

Sosialisasi Penerapan Teknologi Keuangan Internal BUMDes Bulutengger dalam Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Tata Kelola Administrasi Desa

**Sutri Handayani¹, Dewi Kusmayasari², Ahmad Ardiyanto³, Lailatul Rohma⁴, dan
Septi Dwi Wulandari⁵**

Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan, Indonesia¹⁻⁵

Email: sutrihandayani@unisda.ac.id¹, dewikusmayasari@unisda.ac.id²,
devildead638@gmail.com³, rohmalailatul123@gmail.com⁴,
septidwiwulandari123@gmail.com⁵

Abstrak

Teknologi informasi telah menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi dan pengelolaan keuangan. Namun, banyak desa di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengadopsi teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan administrasi keuangan desa yang transparan dan efisien merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Namun, masih banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang baik akibat keterbatasan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menerapkan teknologi keuangan internal di BUMDes Bulutengger guna meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola administrasi desa melalui sosialisasi. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, dan implementasi aplikasi keuangan sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhan BUMDes. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan pencatatan transaksi, kemudahan penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Diharapkan, keberhasilan ini dapat menjadi model replikasi bagi BUMDes lain di wilayah sekitar.

Kata Kunci: bumdes, teknologi keuangan, transparansi, efisiensi, administrasi desa

Abstract

Information technology has become an important element in various aspects of life, including administration and financial management. However, many villages in Indonesia face significant challenges in adopting the technology needed to improve efficiency and transparency in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Transparent and efficient management of village financial administration is one of the keys to successful village development. However, many Village-Owned Enterprises (BUMDes) still face challenges in realizing good administrative governance due to limited technology and human resource capacity. This community service activity aims to implement internal financial technology in BUMDes Bulutengger to improve transparency and efficiency of village administrative governance through socialization. The methods used include socialization, training, technical assistance, and implementation of simple financial

applications tailored to the needs of BUMDes. The results of the activity showed a significant increase in the speed of transaction recording, ease of preparing financial reports, and increased public trust in BUMDes financial management. It is hoped that this success can be a replication model for other BUMDes in the surrounding area.

Keywords: bumdes, financial technology, transparency, efficiency, village administration

Article Info

Received date: 20th March 2025

Revised date: 26th April 2025

Published date: 30th April 2025

A. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang berkembang dengan cepat, teknologi informasi telah menjadi komponen kunci dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam administrasi dan manajemen keuangan. Namun, banyak desa di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengadopsi teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tantangan-tantangan ini meliputi keterbatasan dana, resistensi terhadap perubahan, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, serta kurangnya regulasi yang mendukung (Al-Khouri, A. M., 2011).

Desa-desa di Indonesia sering kali terbatas dalam hal anggaran, yang menghambat kemampuan mereka untuk mengadopsi teknologi. Keterbatasan ini membuat sulit bagi desa untuk berinvestasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan yang diperlukan. Selain itu, pemeliharaan dan pembaruan teknologi membutuhkan biaya tambahan, yang sering kali tidak diprioritaskan dalam anggaran desa (Hall, J. A., 2012). Dengan dana yang terbatas, sulit bagi desa untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam manajemen administrasi dan keuangan.

Resistensi terhadap perubahan adalah tantangan signifikan lainnya dalam penerapan teknologi di desa (Indraswari, *et al.*, 2021). Banyak aparatur desa yang masih nyaman dengan sistem manual dan tradisional yang telah lama digunakan. Ketakutan akan perubahan, kurangnya pemahaman tentang manfaat teknologi, dan kekhawatiran tentang kesulitan mengoperasikan sistem baru sering kali menyebabkan penolakan terhadap inovasi (Ishak, Parmin, & Fitria Syam, 2020).

Mahasiswa yang terlibat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat berperan penting dalam mengatasi resistensi ini. Sebagai contoh, di Desa Bulutengger, mahasiswa KKN dari Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan (UNISDA) membantu mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi transparansi keuangan yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi keuangan BUMDes secara real-time. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi resistensi dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa melalui edukasi dan pelatihan.

Sumber daya manusia yang terampil adalah faktor kunci dalam keberhasilan penerapan teknologi. Namun, banyak desa kekurangan tenaga ahli yang mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi dengan efektif (Ishak, Parmin, & Fitria Syam, 2020). Aparatur desa sering kali tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang cukup dalam teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk membekali aparatur desa dengan keterampilan yang dibutuhkan. Mahasiswa KKN dapat membantu memberikan pelatihan dasar dan pendampingan, sehingga aparatur desa menjadi lebih percaya diri dan kompeten dalam menggunakan teknologi untuk administrasi dan manajemen keuangan (Nuzula, 2020; Uno & Lamatenggo, 2011).

Regulasi yang mendukung sangat penting untuk memastikan implementasi dan pemeliharaan teknologi dalam administrasi desa. Saat ini, banyak regulasi yang belum cukup mengakomodasi kebutuhan teknologi di desa. Reformasi regulasi yang tepat dapat memberikan kerangka kerja yang jelas serta dukungan finansial dan teknis yang diperlukan untuk adopsi teknologi (Romney & Steinbart, 2016; Sukarini & Dewi, 2019). Hal ini akan membantu desa dalam mengimplementasikan aplikasi transparansi keuangan yang dapat meningkatkan keterbukaan dan efisiensi tata kelola desa. Regulasi yang mendukung juga dapat memberikan dorongan yang diperlukan bagi desa untuk beralih dari sistem manual ke sistem digital (Krisnawati, *et al.*, 2016).

Sebagian besar desa masih menggunakan sistem administrasi dan manajemen keuangan yang manual dan tradisional. Sistem ini cenderung kurang efisien, rentan terhadap kesalahan, dan tidak transparan. Perbandingan antara sistem manual dan digital menunjukkan bahwa sistem digital lebih efektif dalam meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi (Mayowan, 2016). Oleh karena itu, peralihan dari sistem manual ke digital menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja administrasi desa. Implementasi sistem digital, seperti yang dilakukan di Desa Bulutengger dengan bantuan mahasiswa KKN, dapat membantu desa mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan informasi yang lebih transparan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Selain adopsi awal, pemeliharaan dan pembaruan teknologi juga menjadi tantangan besar. Banyak desa kesulitan memelihara dan memperbarui teknologi yang sudah ada karena keterbatasan dana dan kurangnya pengetahuan teknis. Strategi yang efektif diperlukan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan teknologi, termasuk pengembangan rencana pemeliharaan yang komprehensif dan penyediaan sumber daya yang memadai. Dengan strategi pemeliharaan yang tepat, desa dapat memastikan teknologi yang diadopsi tetap berfungsi dengan baik dan terus memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat adopsi teknologi di desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan internal BUMDes. Selain itu, Pengabdian masyarakat ini juga bertujuan untuk menyediakan solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan dana, resistensi terhadap perubahan, kekurangan sumber daya manusia, dan tantangan dalam pemeliharaan teknologi. Hasil Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi teknologi dalam administrasi desa serta menilai efektivitas aplikasi transparansi keuangan dalam meningkatkan keterbukaan dan efisiensi tata kelola desa.

B. METODE

Pengabdian masyarakat ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan keuangan internal BUMDes (Ardianto, 2014). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Metode pelaksanaa ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan kontekstual, serta memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai pengalaman dan persepsi aparatur desa dan pengelola BUMDes. Pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai studi kasus eksploratif yang berfokus pada beberapa desa yang menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi untuk administrasi dan pengelolaan keuangan BUMDes. Dalam melaksanakan Pengabdian masyarakat ini, penulis juga akan melakukan pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap BUMDes. Observasi ini mencakup setiap metode transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan disusun dalam bentuk table hasil demografis responden seperti pembayaran PDAM, listrik, penarikan tunai, penggunaan e-wallet (Dana, ShopeePay), pembayaran STNK, dan pembelian tiket pesawat. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat memahami secara mendalam hambatan-hambatan yang ada serta dinamika yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan di BUMDes.

Pelaksanaan Program Kerja di Desa Bulutengger

Dalam rangka pelaksanaan program kerja, mahasiswa KKN dari Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan (UNISDA) mengembangkan program untuk meningkatkan transparansi keuangan internal BUMDes melalui aplikasi yang dapat diakses oleh publik. Program ini bertujuan agar masyarakat, baik dari dalam maupun luar desa, dapat memperoleh informasi mengenai keuangan BUMDes Bulutengger. Program ini didasari oleh observasi mendalam yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung oleh Sekretaris Desa Bulutengger, Bapak Dwi Setyawan. Observasi tersebut menemukan adanya masalah dalam operasional

website digital desa Bulutengger, khususnya pada website resmi kemakmuran BUMDes. Mahasiswa KKN kemudian melakukan observasi lanjutan dengan mengumpulkan data terkait kas keluar dan kas masuk serta pembayaran yang melibatkan perantara yang dikelola oleh BUMDes berbasis teknologi. Sepanjang kegiatan ini, mereka dibimbing oleh dosen UNISDA sebagai pembina lokal desa.

Keterlibatan dalam Pelaksanaan Program Kerja

Observasi langsung di lapangan dilakukan untuk memahami pengelolaan administrasi dan keuangan di desa-desa, baik yang menggunakan teknologi maupun yang tidak. Observasi ini bertujuan mengidentifikasi praktik-praktik yang ada, tantangan sehari-hari, dan interaksi aparatur desa dengan sistem administrasi. Data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung akan dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat adopsi teknologi. Temuan Pengabdian masyarakat ini akan divalidasi melalui diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) dengan para pemangku kepentingan, termasuk aparatur desa, pengelola BUMDes, dan pakar teknologi, guna menyempurnakan solusi dan rekomendasi yang diberikan. Metode Pengabdian masyarakat kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif, yang dipadukan dengan program transparansi keuangan di Desa Bulutengger oleh mahasiswa KKN UNISDA, memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang hambatan adopsi teknologi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Validasi melalui diskusi kelompok terarah memastikan solusi yang relevan dan praktis untuk diterapkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup aspek pendidikan, pengalaman, sikap, dan nilai-nilai yang penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa (Indraswari & Rahayu, 2021). Kompetensi aparatur desa memiliki peran signifikan dalam mencapai akuntabilitas tersebut. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana

desa. Keputusan yang diambil oleh pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi (Nuzula, T. T., 2020).

Penggunaan teknologi informasi mendukung pemerintah desa dalam mengelola data dana desa secara lebih efisien dan transparan, sejalan dengan teori stewardship. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan dana desa yang lebih cepat dan tepat, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan akuntabilitas.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk mengakui keberagaman desa, memberikan kepastian hukum, melestarikan adat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa (Mayowan, Y., 2016). Meskipun krisis ekonomi global berdampak luas pada perekonomian, pemerintah didorong untuk menjadi lebih transparan dan efisien melalui model pemerintahan yang berfokus pada masyarakat ("Citizen-Centric"), yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup warga dan kepercayaan terhadap pemerintahan (Al-Khouri, A. M., 2011).

Transaksi keuangan mempengaruhi aset dan ekuitas organisasi, yang diukur dalam bentuk moneter (Hall, 2012). Sistem informasi akuntansi mengolah data keuangan menjadi laporan yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2016).

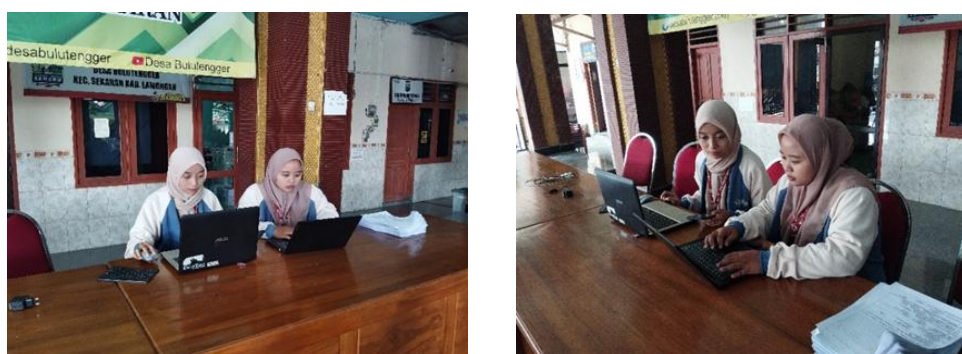
Tabel di bawah ini menggambarkan neraca keuangan BumDes, memuat hasil dari implementasi teknologi aplikasi ke dalam neraca keuangan BumDes.

Tabel 1. Data Neraca Saldo BumDes BuluTengger

Nama Akun	Neraca Saldo Setelah Penyelesaian	
	Debit	Kredit
Kas Tunai	Rp 27.887.087	
Persediaan Barang		
Dagang	Rp 37.579.301	
Peralatan	Rp 3.633.000	
Modal		Rp 75.212.523
Retur Pembelian		Rp 642.365
Beban Peralatan	Rp 500.000	
Beban Penguatan SDM	Rp 250.000	

Beban cetak dan dekorasi	Rp	150.000	
Beban perlengkapan lainnya	Rp	100.000	
Beban listrik	Rp	2.523.000	
Beban operasional	Rp	22.500	
Beban ongkos kirim	Rp	210.000	
Beban Upah Karyawan	Rp	3.000.000	
Total	Rp	75.854.888	Rp75.854.888

Sumber: Data Olah (2024)



Gambar 1. Dokumentasi Implementasi Keuangan BumDes Desa Bulutengger.

Berdasarkan Tabel.1 diketahui bahwa terdapat 2 akun yakni, akun debit dan akun kredit. Secara singkat dijelaskan bahwa debit merupakan pencatatan untuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas, sementara kredit merupakan pencatatan untuk peningkatan hutang atau ekuitas. Kedua istilah ini penting dalam menjaga akurasi dalam akuntansi dan memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat dengan benar.

Kolom ini menunjukkan nilai masing-masing akun dari total transaksi. Misalnya, Kas tunai mempunyai akun debit sebesar Rp 27.887.087, sedangkan akun modal mempunyai akun kredit sebesar Rp 75.212.523. nilai-nilai akun ini memberikan gambaran transparansi masing-masing akun neraca keuangan BumDes BuluTengger.

BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang dikelola oleh desa dan masyarakat desa, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa sesuai potensi

lokal (UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005). BUMDes beroperasi dengan prinsip kooperatif dan partisipatif, diatur oleh Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2015.

Laporan keuangan yang relevan mempengaruhi keputusan pengguna dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi (Indraswari & Rahayu, 2021). Penggunaan teknologi informasi dalam BUMDes penting untuk mempermudah pekerjaan dan mengurangi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan teknologi informasi, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Sukarini & Dewi, 2019; Uno & Lamatenggo, 2011).

Dengan tujuan utama BUMDes yaitu mempermudah masyarakat Bulutengger dalam melakukan pembayaran dan pembelanjaan dengan harga yang murah untuk meringankan beban dan mempermudah masyarakat Bulutengger, mengoptimalkan aset desa, pengelolaan potensi perekonomian desa, dan bisnis sosial. Pengabdian masyarakat ini akan mencantumkan hasil dari Pengabdian masyarakat tentang kas keluar masuk yang diperoleh dari BUMDes dan kas tunai. Selain itu, akan menganalisis hasil dari masyarakat mengenai berapa persen dari semua transaksi di BUMDes yang dilakukan dengan metode klasik dan modern.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat terkait implementasi teknologi keuangan internal BUMDes Bulutengger, akan mampu meningkatkan keterbukaan dan efisiensi tata usaha desa, seperti mempermudah masyarakat Bulutengger dalam melakukan pembayaran dan pembelanjaan dengan harga yang murah untuk meringankan beban dan mempermudah masyarakat Bulutengger, mengoptimalkan aset desa, pengelolaan potensi perekonomian desa, dan bisnis sosial. Teknologi informasi memainkan peran krusial dalam administrasi dan pengelolaan keuangan. Pengabdian masyarakat ini mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh desa-desa di Indonesia dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tantangan utama tersebut meliputi

keterbatasan dana, resistensi terhadap perubahan, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, serta kekurangan dukungan regulasi. Keterbatasan dana menghambat investasi desa dalam pembelian perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan yang diperlukan. Resistensi terhadap perubahan timbul karena aparatur desa lebih nyaman dengan sistem manual dan tradisional dan kurang memahami manfaat dari teknologi baru. Pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi, pelatihan, pengembangan kapasitas SDM, dan dukungan regulasi yang memadai. Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari Pengabdian masyarakat ini, diharapkan desa-desa dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan mereka.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan dan LPPM UNISDA yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan Implementasi Teknologi Keuangan Internal BUMDes Bulutengger, Meningkatkan Keterbukaan dan Efisiensi Tata Usaha Desa Tahun 2024 melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat pada KKN TEMATIK di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khoury, A. M. (2011). *An innovative approach for e-government transformation*.
Diunduh dari <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1105/1105.6358.pdf>.
Diakses Senin, 28 Juli 2024.
- Ardianto, E. (2014). *Metodelogi penelitian untuk public relations kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hall, J. A. (2012). *Accounting information systems*. Cengage Learning.

- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Ishak, P., & Syam, F. (2020). Pengaruh kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 120–130.
- Krisnawati, E., Marina, A., Ak, C. A., & Maharani, R. S. (2016). Perlakuan akuntansi sumber daya manusia menurut PSAK 19 terhadap penyajian laporan keuangan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Mayowan, Y. (2016). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di desa (studi kasus di Kabupaten Lamongan). *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 14–23.
- Nuzula, T. T. (2020). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada kantor desa di wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat) (Skripsi, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi).
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Sistem informasi akuntansi* (Edisi 13, cetakan keempat). Jakarta: Salemba Empat.
- Sukarini, L., & Dewi, P. E. D. M. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Bumdes di Kecamatan Negara. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(3).
- Uno, H. H. B., & Lamatenggo, N. (2011). *Teknologi komunikasi dan informasi dalam dunia pembelajaran* (Cet. II). Jakarta: Bumi Aksara.